



### Upaya Melestarikan Nilai Pancasila di Era Reformasi

Rikha Dwianti Ningrum<sup>1</sup>, Zulaygha Putri Nur Azizah<sup>2</sup>, Safina Zulfaizah<sup>3</sup>, Riska Andi Fitriano<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>1</sup>rikhadn04@student.uns.ac.id, <sup>2</sup>zulayghaputri@student.uns.ac.id\*, <sup>3</sup>safinazulfa12@student.uns.ac.id,  
<sup>4</sup>riskaandi@staff.uns.ac.id

#### Abstract

*The 1998 New Order and Reform Regime was an event that led to the decline of a nation's outlook on life and the abandonment of the policy of socializing the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This led to radicalization and terrorism of radical groups. Society is in a difficult position. It has left the old values, but the new order values have not yet taken effect. The euphoria of freedom and reform has given birth to a new understanding that is not always in line with the values of the life of the nation and state. One of the new understandings is the emergence of religious groups with radical ideologies that encourage violent acts of extremism and terrorism. Based on the description of this condition, the main problem is that the current implementation of Pancasila values in the face of radicalism and terrorism has not been optimal. This has an impact on the ideological resilience of the population which in turn has an impact on national security. Pancasila, the basic vision of the Indonesian state, needs to be understood correctly and completely.*

*Keywords: Vision, Pancasila, Radicalism, Ideology*

#### Abstrak

Rezim Orde Baru dan Reformasi 1998 merupakan peristiwa yang menyebabkan merosotnya pandangan hidup suatu bangsa dan ditinggalkannya kebijakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menyebabkan radikalisasi dan terorisme kelompok radikal. Masyarakat berada dalam posisi yang sulit. Sudah meninggalkan nilai lama, tapi nilai orde baru belum berlaku. Euforia kebebasan dan reformasi telah melahirkan pemahaman baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pemahaman baru tersebut adalah munculnya kelompok agama dengan ideologi radikal yang mendorong aksi kekerasan ekstremisme dan terorisme. Berdasarkan deskripsi kondisi ini, maka permasalahan utamanya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini dalam menghadapi radikalisme dan terorisme belum optimal. Hal ini berdampak pada ketahanan ideologis penduduk yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan nasional. Pancasila, visi dasar negara Indonesia, perlu dipahami secara benar dan utuh.

Kata kunci: Visional, Pancasila, Radikalisme, Ideologi

© 2023 JLARI

#### 1. Pendahuluan

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan Mahakarya para pendahulu bangsa yang tergal dari jati diri dan nilai-nilai adi luhur bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan berbagai kajian ternyata didapat

beberapa kandungan dan keterkaitan antara sila tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dikarenakan antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yang lain. Hal ini tentu menjadi ciri khas dari semua kegiatan serta aktivitas seruan dan pasang surut perjalanan sejarah bangsa yang telah melewati masa-masa sulit dari jaman

penjajahan sampai pada saat mengisi kemerdekaan. Pancasila memegang peranan penting sebagai penentu arah dan pedoman untuk bangsa Indonesia mencapai tujuan yang luhur. Selain itu, Pancasila juga dapat berfungsi untuk menstabilkan keamanan negara yang memayungi masyarakat beragam sehingga tercipta bangsa yang bersatu dan berpadu.

Ironisnya, ternyata banyak Masyarakat Indonesia sendiri yang kini sudah melupakan dan sudah asing dengan pancasila itu sendiri. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, kenapa dan ada apa dengan kita sebagai anak bangsa yang justru besar dan mengalami pasang surut permasalahan negara ini dan belum bisa mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terlebih lagi saat ini dengan jaman yang disepakati dengan nama Era Reformasi yang terlahir dengan semangat untuk mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan-penyelewengan sebelumnya.

Implementasi Pancasila sebelum Reformasi 1998 telah mengalami berbagai cobaan, seperti munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama, atau upaya rezim Orde Baru untuk menyalagunakan Pancasila atas nama kekuasaan. Selama Reformasi 1998 seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, penerapan Pancasila juga terhalang oleh banyak godaan. Berakhirnya Orde Baru telah membuka pintu kebebasan bagi rakyat Indonesia, hampir di semua lini kehidupan. Penerapan Pancasila kini mendapatkan tantangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan (Ai Tin dan Asep Sutisna, 2018). Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif, salah satunya dengan munculnya kreativitas anak bangsa. Namun, ada juga beberapa sisi negatifnya. Contohnya antara lain terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tak beretika atau asusila, penyalagunaan narkoba dan minuman keras, perilaku anarkisme-vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Arah dan tujuan utama reformasi adalah untuk menanggulangi atau mengatasi dan menghilangkan krisis jangka panjang di segala bidang kehidupan melalui pengurangan secara bertahap dan berkelanjutan, serta menata kembali sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur untuk mencapai kondisi yang lebih baik menuju Indonesia baru. Pada masa sekarang arah

tujuan reformasi kini tidak jelas, untungnya meski secara birokratis rezim orde baru telah runtuh namun mentalitas orde baru masih nampak dimana-mana. Sedangkan pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan nilai nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah ideologi politik, Pancasila mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi bisa pula pudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahan ideologi tersebut. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat bila mempunyai tiga dimensi. Ketiga dimensi antara lain sebagai berikut meliputi: Idealisme, Realita, Fleksibilitas.

Oleh karena itu, pancasila sebagai ideologi harus memiliki dimensibilitas agar substansi-substansi pokok yang dikandungnya tidak lekang oleh waktu. Sejak tahun 1998 hingga masa reformasi sekarang ini, masyarakat mulai mempertanyakan relevansi dari pancasila untuk menjawab segala tantangan zaman terutama di era globalisasi ini. Jadi menurut saya pancasila mutlak diperlukan, dan untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan nilai nilai pancasila dalam kebijakan-kebijakan yang dapat diatur oleh pemerintah.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1. Pelaksanaan Pancasila pada Masa Reformasi**

Reformasi di Indonesia mengacu pada era politik Indonesia pasca pengunduran diri Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Berakhirnya kekuasaan Suharto dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsisten. Saat itu, korupsi, kolusi dan otokrasi merajalela di segala bidang. Inilah salah satu alasan yang melatarbelakangi lahirnya reformasi di Indonesia. Perlakuan buruk dan perlakuan tidak adil terhadap pemerintahan Presiden Soeharto memperparah kekecewaan publik karena situasi ekonomi Indonesia saat itu melemah dan memburuk. Gerakan reformasi lahir di puncak kekecewaan dan ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat kemudian meningkat dan memicu protes besar-besaran akibat berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia.

Pada masa Reformasi pancasila harus selalu direinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman. Penafsiran Pancasila harus tepat dan sesuai dengan

konteks, serta konsisten dengan realitas saat ini. Banyak perubahan telah dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai ideologi pancasila. Namun, masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terselesaikan. Pancasila pada masa Reformasi juga dapat dilihat tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, karena masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terus terjadi di negara Indonesia.

Kelemahan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di era Reformasi antara lain :

- a. Pancasila dijadikan ideologi bangsa tanpa menghiraukan relevansinya dengan perkembangan zaman
- b. Elite politik cenderung memanfaatkan gelombang reformasi ini hanya untuk merebut kekuasaan
- c. Pemerintah kurang konsisten dalam penerapan hukum
- d. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah

Fungsi pancasila :

- a. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila adalah ajaran, pemikiran, doktrin, teori atau ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, negara dan bangsa. Negara Indonesia adalah tempat yang beragam dan dinamis dengan sejarah yang panjang. Bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis dan terarah dengan pelaksanaan yang jelas.

Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia, yang didalamnya terkandung ajaran dan gagasan secara sistematis dan memberikan petunjuk bagaimana menerapkannya. Selain itu, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel terhadap waktu. Kondisi yang dapat berinteraksi dengannya tidak terpengaruh oleh perubahan makna atau nilainya.

Dari penjelasan tersebut, setidaknya ada tiga jenis nilai yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan. Antara lain, ada nilai dasar yang tidak

berubah bagaimanapun kondisinya, dan ada nilai instrumental yang dapat berubah tergantung kondisi, tetapi tetap mengandalkan nilai dasar. Terakhir, ada nilai-nilai praktis berupa penerapan nilai-nilai nyata. Namun, realisasi atau implementasi nilai instrumental dan nilai praktis harus mengandung semangat yang sama dengan nilai dasar.

- b. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara artinya pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur administrasi negara. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara, yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Semua peraturan pemerintah harus sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

- c. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Istilah ini sering disebut sebagai gaya hidup. Pancasila ibarat pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi segala arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang. Dengan demikian, setiap warga negara wajib menjalankan segala kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh menyimpang darinya

- d. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Artinya sebagaimana bendera merah putih merupakan ciri khas bangsa atau negara Indonesia untuk membedakannya dengan negara atau negara lain, maka Pancasila juga merupakan ciri bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan . yang senantiasa rukun, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- e. Prinsip yang terkandung dalam Pancasila

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan acuan bahwa dalam berpikir sikap dan tindakan bangsa Indonesia harus berorientasi pada asas yang terkandung didalamnya, termasuk mencapai keserasian dan kelestarian alam semesta. Manusia bebas berpikir, bebas mencoba, tetapi memahami dan percaya bahwa pada akhirnya semua memutuskan adalah Tuhan, Maha Esa. Dalam menentukan pilihan tindakan, seseorang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan

itu harus diperhitungkan dan harus menerima konsekuensi dari pilihan tindakannya.

- Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan contoh bahwa dalam proses berpikir, emosi dan tindakan, orang secara konsisten menempatkan orang lain sebagai mitra, sesuai dengan martabat dan nilai. Hak dan kewajiban mereka dihormati secara beradab. Dengan demikian, tidak akan ada penindasan atau pemerasan. Semua kegiatan berlangsung secara bersama-sama dalam keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.
- Prinsip Persatuan Indonesia, menunjukkan pola pikir dan sikap Perbuatan bangsa Indonesia harus mengarah pada keutuhan dan kekuatan bangsa Republik Indonesia. Kita mengaku bahwa ada bangsa yang berbeda di satu negara ini keragaman agama, adat istiadat, budaya, ras, suku, dll. harus didudukkan proporsional bangsa yang bersatu. Dalam kasus perselisihan, kemudian kepentingan nasional mengutamakan kepentingan pribadi
- Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan petunjuk bahwa dalam pikiran, tindakan, dan perilaku harus berdaulat. Aspirasi rakyat menjadi dasar penyusunan kesepakatan bersama melalui musyawarah/perwakilan. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai melalui konsultasi, pemungutan suara dapat dilakukan. Setiap keputusan dibuat dengan kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak tanpa kecuali dan semua pihak wajib melakukannya.
- Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan standar pemikiran, sikap dan tindakan yang mengarah pada tercapainya kebahagiaan sosial yang merata secara fisik dan mental bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali. Kebahagiaan harus dirasakan oleh semua kelas masyarakat dan merata di semua wilayah.

## 2.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila

Terlepas dari bentuk dasar negara yang digunakan suatu negara, ia menjadi tidak berharga tanpa penerapan dan pengamalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik rakyat maupun para pengelola . Negara. Tidak mau

melaksanakan dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, akan mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara . Di sisi lain, jika keengganan datang dari elit politik dan pengelola negara, maka keberadaan Pancasila akan tetap menjadi semboyan. Dalam praktiknya, kurangnya keikhlasan ini akan menimbulkan kecenderungan menyalahgunakan pelaksanaan hukum dasar negara sebagai alat meletimasikan kekuasaan.

Oleh karena itu, dalam undang-undang ini (khususnya pemerintah) harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri jika masih menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan untuk negara karena Pancasila adalah landasan yang sesuai untuk negara ini dan telah disetujui oleh seluruh orang Indonesia dalam sidang penetapan dasar negara

Setiap sila Pancasila harus tetap dihayati dan diamalkan, tidak dilupakan dan dikesampingkan. Kebijakan pemerintah saat ini masih jauh dari penerapan sila Pancasila, namun ada beberapa kebijakan yang mengarah pada penerapan sila Pancasila, meskipun sedikit semua sila Pancasila bila diteliti, kebijakan pemerintah masih jauh dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

## 3. Kesimpulan

Pancasila kini semakin dilupakan, tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah. Seolah-olah posisi Pancasila mulai berubah. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia akan terkena dampaknya. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pemahaman bangsa terhadap ideologi Pancasila, tidak terlepas dari kelemahan Pendidikan Pancasila yang berlanjut hingga saat ini. Tidak kalah pentingnya, kelemahan mendasar dalam pendidikan Pancasila adalah kurangnya pembahasan sejarah perjalanan Pancasila ke Indonesia.

Pancasila masih menjadi falsafah, dasar negara, ideologi negara kita. Artinya, kita meyakini Pancasila adalah sumber inspirasi dan adalah sumber solusi atas permasalahan bangsa. Banyak yang mengaitkan kegagalan membangun negara sejahtera karena gagal memenuhi amanat Pancasila. Berbagai persoalan bangsa yang muncul pada tahun ternyata disebabkan oleh penyimpangan Pancasila dan UUD 1945.

### Daftar Rujukan

- [1] As'ad Said Ali, 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Penerbit LP3ES, Jakarta..
- [2] Kholid O. Santosa, 2004, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945 – sebuah rekonstruksi sejarah atas gagasan dasar Negara RI, consensus nasional, dan demokrasi di Indonesia, Penerbit Segi Arsy, Bandung.
- [3] Midian Sirait, 2008, Revitalisasi Pancasila – catatan-catatan tentang bangsa yang terus menerus menanti perwujudan keadilan sosial, Penerbit Kata, Jakarta.
- [4] Mubyarto, 1997, Ekonomi Pancasila – Lintasan Pemikiran Mubyarto, Penerbit Aditya Medya, Yogyakarta.
- [5] Halim, Al. (2016). Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat. Seminar Nasional Hukum, 2 (1).
- [6] Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya., M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. Jurnal Etika Demokrasi (JED). 4 (2), 89-98. <https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- [7] Nahuddin, Yusuf Ekoo. (2017). Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila Ke-4 Pancasila. Jurnal CakrawalaHukum, 8 (2)
- [8] Sastrapratedja, M. 1992. “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”. Dalam Pancasila sebagai Ideologi, disunting Oetojo Oesman dan Alfian. Jakarta: BP-7 Pusat.
- [9] Smith, D.E. 1970. Religion and Political Development. Boston: Little, Brown and Company.
- [10] Sukendro, Greg Genep. 2012. Pancasila: Riwayatmu Kini. Jakarta: Yayasan Tifa.
- [11] Surya, Aji. 2012. Geliat Islam di Rusia. Buku Kompas, Jakarta.
- [12] Suwarno, P.J. 2009. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Kanisius